

**PASANG SURUT HUBUNGAN SIPIL-MILITER
DALAM PERPOLITIKAN PAKISTAN**

Aisyah Saipuddin

*Dosen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Mulawarman*

ABSTRACT

For many new countries, the government under the military regime is understandable regarded some difficulties of consolidating the political forces and variety problems in the new states. As time goes by the civilian government is a necessity in the context of democratization. But it is not the case in Pakistan. In the history of the country, there are several times power changing between the civilian and military leadership. The inability of civilian leaders to control national security, ethnic conflict and the prolonged economic instability, corruption, Kashmir cause military intervention in politics. This article explores the dynamic of civilian and military relationship in Pakistan political system.

Key Words: *Pakistan, Military Intervention, Politics*

PENDAHULUAN

Sejak melepaskan diri dari India dan menjadi negara merdeka pada tahun 1947, Pakistan telah mengalami beberapa kali kudeta militer. Di antaranya adalah pada tahun 1958 ketika Ayub Khan mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Iskander Mirza (1956-1958) dan memberlakukan undang-undang darurat serta melarang kegiatan politik apapun. Ia menetapkan sistem pemerintahan yang disebut sebagai *Basic Democracy* dan menyediakan badan pemilihan untuk memilih Presiden, dan menolak pelaksanaan Demokrasi Parlementer serta lebih mendukung penerapan Demokrasi terpimpin yang lebih terbatas yang dipimpin oleh militer. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Basic Democracy* menjangkau desentralisasi kekuasaan yang terbatas tapi nyata dalam badan-badan di tingkat distrik sampai suatu sistem pemilihan tidak langsung bagi Presiden. Pada tahun 1960, Ayub Khan mengubah kebijakan mengenai pers dan publikasi di Pakistan, di mana rezim yang berkuasa dapat memberikan larangan terhadap peredaran surat kabar dan media massa lainnya. Rezim Ayub Khan juga memberikan kontrol ketat organisasi, serikat dagang, dan kelompok pelajar untuk menghindari aktivitas politik. Mereka dibungkam oleh pemerintah melalui ancaman maupun penggunaan kekerasan karena Ayub Khan merasa khawatir terhadap aktivitas kaum oposisi yang sangat berpengaruh pada penegakan Demokrasi. Akhir tahun 1969 Ayub Khan mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Agha Mohammad Yahya Khan. Yahya Khan sendiri juga berasal dari kalangan militer dan berkuasa hingga tahun 1971. Antara tahun 1971-1977 Pakistan dipimpin oleh pemerintah sipil di bawah Perdana Menteri Zulfikar Ali

Bhutto yang memenangkan pemilu tahun 1971. Tetapi lagi-lagi militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer yang dilakukan Jenderal Zia ul-Haq (1977-1988) yang kemudian mengeksekusi mati Zulfikar Ali Bhutto atas tuduhan membunuh lawan-lawan politiknya selama ia berkuasa. Pada tahun 1988 terjadi kecelakaan pesawat yang menyebabkan kematian Zia ul-Haq dan beberapa petinggi militer Pakistan serta beberapa orang diplomat Amerika Serikat. Selanjutnya berdasarkan hasil pemilu di akhir tahun 1988, *Pakistan People's Party* (PPP), partai yang dibentuk oleh Zulfikar Ali Bhutto memperoleh kursi terbanyak di parlemen dan berhasil menempatkan Benazir Bhutto sebagai perdana menteri. Selama 10 tahun berikutnya posisi perdana menteri berganti-ganti diduduki oleh Benazir Bhutto dan saingan politik sipilnya, Nawaz Sharif, sehinggalah pada tahun 1999 kembali terjadi kudeta militer dibawah komando Jenderal Pervez Musharraf yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata terhadap pemerintahan Nawaz Sharif. Musharraf mengangkat dirinya sebagai perdana menteri hingga tahun 2001 dan memegang jabatan sebagai presiden hingga tahun 2008.

Keterlibatan militer dalam politik di Pakistan memang menarik untuk dikaji mengingat setelah berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Dingin dunia internasional telah bergerak ke arah demokrasi, di mana banyak rezim otoriter dan militeristik di berbagai belahan dunia mengalami kejatuhan. Tetapi di negara yang selalu bergolak ini selalu terjadi pasang surut antara pemerintahan sipil dan militer yang menunjukkan tingkat demokrasi yang masih rendah. Lalu apa sesungguhnya yang menyebabkan militer di Pakistan selalu mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah sipil?

PEMBAHASAN

Rezim militer dan atau keterlibatan militer dalam politik merupakan fenomena umum di negara-negara Dunia Ketiga. Penyebabnya banyak tetapi tidak dapat dikatakan universal, artinya jika di negara A berlaku kondisi xyz yang mengundang intervensi militer maka di negara B yang juga mengalami kondisi xyz belum tentu mendorong militernya mengambil alih kekuasaan. Amos Perlmutter menyatakan:

“Terdapat suatu hubungan antara stabilitas lembaga-lembaga sipil dan kecenderungan militer untuk melakukan intervensi. Semakin lemah infrastruktur politik maka semakin besar keinginan intervensi militer itu. Sebaliknya semakin luas cakupan aparat sipil maka semakin kecil keinginan militer mengambil alih dan menjalankan pemerintahan” (A. Hasnan Habib, 1996: 116).

Menurut Harold Crouch, keterlibatan militer dalam politik disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Yang dimaksudkannya dengan faktor internal adalah:

- 1) Orientasi para pejabat militer yang merupakan hasil pengalaman historis militer. Asal-usul dan peran awal militer membentuk tradisi dan tata nilai yang menjadi panutan bagi generasi perwira awal dan generasi selanjutnya. Ditinjau dari asal-usul mereka, Crouch mengidentifikasi dua tipe angkatan bersenjata di Dunia Ketiga. Ada angkatan bersenjata yang dibentuk pada periode kolonial dan yang diindoktrinasi untuk menerima konsep Barat tentang profesionalisme apolitis dan supremasi sipil; angkatan bersenjata lain dibentuk dalam situasi di mana mereka tidak perlu setia terhadap prinsip tersebut. Yang termasuk kategori ini adalah angkatan bersenjata yang dibentuk untuk memerangi kolonialisme, militer negara-negara tradisional yang non-kolonial dan tidak pernah mengambil peran dalam perkara non-politik. Myanmar menunjukkan situasi ini di mana para pemimpin nasionalis membangun angkatan bersenjata untuk melaksanakan perjuangan melawan para kolonialisme Inggris. Angkatan bersenjata ini sangat berorientasi politik dan tidak dapat diganggu-gugat oleh kepercayaan apapun tentang profesionalisme apolitis.
- 2) Kepentingan material militer. Militer punya kebutuhan bersama yang jelas, seperti alokasi budget bagi penyediaan fasilitas maupun gaji yang memadai bagi para anggotanya. Ketika pemimpin politik gagal memenuhi kebutuhan ini, ada kecenderungan lebih besar bagi pihak militer untuk berpolitik dan melakukan intervensi dalam bidang politik (Silver Singh, 1995: 8-9).

Selanjutnya faktor eksternal yang menyebabkan keterlibatan militer dalam politik adalah:

- 1) Kondisi sosio-ekonomis. Pada umumnya dipercaya bahwa intervensi militer tidak terjadi di negara-negara yang sudah maju secara politik, ekonomi dan sosial dibandingkan dengan negara-negara yang kurang berkembang atau Dunia Ketiga. Pada umumnya ada ukuran-ukuran umum mengenai pembangunan dalam pengertiannya yang ketat—pendapatan nasional perkapita, produktivitas nasional kotor, tingkat industrialisasi dan konsumsi energi, dan tingkat melek huruf nasional. Walaupun faktor sosio-ekonomis merupakan faktor yang penting, apakah militer akan campur tangan atau tidak, dan kapan militer akan melakukan intervensi, terutama akan tergantung pada situasi politik.
- 2) Situasi politik. Intervensi militer dalam politik adalah akibat ketidakstabilan otoritas sipil menjalankan pemerintahan secara efektif. Harold Crouch menyatakan:

“Kalaupun pernah, pihak militer jarang mengambil alih kekuasaan hanya untuk memenuhi ambisinya sendiri. Bahkan ketika pihak militer telah menyesuaikan diri secara politis ambisius, intervensi militer biasanya terjadi setelah kegagalan pemerintahan sipil untuk menjaga stabilitas politik dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Kegagalan ini mengakibatkan hilangnya legitimasi yang membuat mereka rentan terhadap perubahan yang keras. Jadi kegagalan rezim-rezim sipil tidak hanya memberikan alasan tetapi juga kesempatan bagi suatu intervensi militer. Sebaliknya, pemerintahan sipil yang kuat dan efektif yang berhasil memelihara legitimasinya nampaknya sungguh-sungguh kebal terhadap kemungkinan kudeta militer.”

Walaupun korps militer ambisius dalam bidang politik, eksistensi para politikus sipil yang memikirkan diri sendiri, korup dan tidak punya kemampuan handal dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat akan memberikan alasan yang sah bagi militer untuk menjadi semakin terlibat dalam politik, sebagaimana yang terjadi di sebagian besar negara Dunia Ketiga. Dalam situasi demikian, menurut Samuel Huntington, muncullah “praetorianisme”, yakni situasi di mana pengawal menempatkan dirinya pada tempat yang diduduki oleh orang yang mereka kawal.

- 3) Faktor-faktor internasional. Banyak analis menuduh pihak militer melakukan intervensi atas perintah CIA (*Central Intelligence Agency*) untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap tidak responsif terhadap tuntutan-tuntutan kebijakan luar negeri Amerika. Intervensi militer dalam politik juga dihubungkan dengan pertumbuhan investasi asing dan integrasi ekonomi Dunia Ketiga dengan ekonomi internasional. Karena pertumbuhan ekonomi yang cepat sering mengakibatkan ketimpangan besar dalam penghasilan—sehingga menimbulkan kemarahan massa terhadap dominasi ekonomi asing dan pada akhirnya juga kemarahan terhadap pemerintahan sipil yang memulai kebijakan ekonomi semacam itu—dalam situasi ini, bisa saja militer terdorong melakukan intervensi (Biler Singh, 1995: 10-11).

Monte Palmer dalam bukunya *Dilemmas of Political Development* mengungkapkan jumlah angka kudeta militer di negara-negara berkembang yang begitu menakutkan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Masa itu ada pandangan bahwa pemerintahan militer adalah pemerintahan masa depan (Monte Palmer: 233). Persepsi ini diperkuat dengan kenyataan bahwa pemerintahan yang demokratis dan kharismatik tidak mampu membawa negara yang dipimpinnya ke arah pembangunan ekonomi yang menjanjikan. Beberapa pengamat meski tetap menyesalkan jatuhnya suatu rezim demokratis tetapi beranggapan bahwa negara-negara berkembang membutuhkan kondisi yang disiplin dan stabil yang dapat diciptakan oleh rezim militer jika negara itu ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Pendapat Palmer didukung oleh pernyataan A. Hasnan Habib bahwa angkatan bersenjata di negara berkembang dinilai sebagai golongan yang tersusun rapi dalam suatu organisasi yang relatif modern dan canggih. Berbagai lembaga pendidikan dan latihan yang dimilikinya dapat sangat bermanfaat bagi masyarakat. Para perwiranya banyak yang mengecap pendidikan atau latihan di luar negeri. Mereka juga sudah terbiasa dengan pekerjaan perencanaan dan pengendalian. Semua ciri-ciri demikian sangat diperlukan dalam upaya modernisasi dan pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian tidak ada kesimpulan yang tegas dan absah bagi semua kasus yang dapat ditarik tentang baik-buruknya atau untung-ruginya suatu rezim militer. Tidak ada jaminan bahwa rezim sipil akan lebih baik atau lebih berhasil daripada rezim militer. Terdapat contoh-contoh rezim militer yang cukup berhasil setelah kegagalan rezim sipil yang digantikannya, tetapi yang sebaliknya pun ada (A. Hasnan Habib, 1988: 16).

Kebanyakan negara kolonial mempersiapkan rakyat jajahan untuk menjadi abdi mereka selama-lamanya. Hanya sedikit penduduk yang dipersiapkan untuk merdeka. Namun ada satu bidang yang mereka persiapkan dengan sungguh-sungguh yaitu bidang militer, walaupun pada awalnya difungsikan sebagai tenaga-tenaga kepolisian kolonial. Dengan demikian lengkaplah peluang untuk terjadinya kudeta di negara-negara Dunia Ketiga. Ketidaksiapan para intelektual dalam bidang ekonomi dan politik di satu sisi dan kesiapan pihak militer untuk mengambil alih kepemimpinan di sisi lain.

Republik Islam Pakistan

Pakistan adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Di sebelah timur, negara ini berbatasan dengan India. Di barat, berbatasan dengan Iran dan Afghanistan, di utara dengan Afghanistan dan Cina, sementara di selatan berbatasan dengan laut Arab dan teluk Oman. Luas Pakistan adalah 703.943 Km yang terbagi atas empat propinsi: Baluchistan, Sindh, Punjab dan wilayah Barat Daya.

Berdirinya Republik Islam Pakistan tidak lepas dari peran seorang pengacara muslim Muhammad Ali Jinnah. Dasar pendirian negara ini terartikulasikan dalam gagasan pendiri-pendirinya yang tergabung dalam Liga Muslim India (All Indian Moslem League) yang menghendaki komunitas muslim sebagai bangsa yang terpisah dari anak benua India di mana mereka mampu menerapkan ajaran Islam dan hidup selaras dengan petunjuknya.

Menurut laporan IDB tahun 2011, penduduk Pakistan berjumlah 187,342,721 jiwa. Bahasa resmi yang dipakai adalah Urdu dan Inggris, namun bahasa yang lain juga digunakan sebagian masyarakat, di antaranya Punjabi, Sindhi, Pushtu

dan Baluchi. Sebanyak 97% penduduknya adalah Muslim, selebihnya Hindu, Budha dan Kristen.

Perekonomian Pakistan ditopang oleh sektor pertanian. Hasil utama pertaniannya adalah gandum, beras, maizena, kapas, tebu dan kacang-kacangan. Sebagiannya diekspor ke luar negeri. Pakistan sendiri mengimpor barang dari luar negeri di antaranya minyak, bahan kimia, perlengkapan transportasi, kacang-kacangan, tepung, minyak goreng, besi dan baja.

Selama sepuluh tahun sejak kemerdekaannya, pertumbuhan ekonomi di negara yang tidak banyak memiliki industri dan tidak adanya infrastruktur yang memadai ini berjalan sangat lambat. Hanya berkisar 2,9% per tahun. Namun keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi itu selalu ada. Ketika Ayub Khan memimpin Pakistan, pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) naik menjadi 5,3% per tahun. Selama tahun 60-an industrialisasi telah dimulai dan 'Revolusi Hijau' membuahakan produktivitas di sektor pertanian.

Meskipun kemandegan ekonomi menjadi hal yang mendapat perhatian khusus di era 70-an, namun pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,65% per tahun selama lebih kurang tiga puluh tahun sejak pemerintahan Ayub Khan hingga berakhirnya pemerintahan militer Zia ul-Haq (1977-1988). Ketika Zia memecat Bhutto di tahun 1977 ekonomi Pakistan sedang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan nasionalisasi yang dilakukannya dengan memakai istilah *Islamic Socialism*. Untuk memulihkan kembali perekonomian Pakistan, Zia mulai mendenasionalisasikan semua industri yang sebelumnya dibekukan oleh Bhutto dan menggalakkan investasi dari sektor swasta. Tetapi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi ternyata sangat mengandalkan sumber-sumber luar negeri, yaitu bantuan dari Amerika Serikat dan dari tenaga kerja Pakistan yang bekerja di luar negeri (kebanyakan di negara-negara Timur Tengah).

Politik dan Pemerintahan di Pakistan

Badan legislatif Pakistan (*Majlis-I-Shoora*) terdiri atas Senat (Majlis Tinggi) dan Dewan Nasional (Majlis Rendah). Senat merupakan badan legislatif tetap yang dipilih oleh anggota dewan masing-masing provinsi. Menurut konstitusi, ketua Senat dapat bertindak selaku presiden hingga presiden yang baru terpilih. Dewan Nasional dipilih oleh seluruh penduduk Pakistan yang berumur 21 tahun ke atas. Anggota Dewan Nasional berjumlah 207 orang. Kursi wakil rakyat dialokasikan di tiap provinsi. Dewan Nasional bertugas untuk masa 5 tahun kecuali mereka wafat atau berhenti sebelum waktunya atau badan itu dibubarkan. Walaupun anggota Dewan Nasional mayoritas Muslim namun 5%

kursi disediakan bagi kelompok minoritas seperti Kristen, Hindu dan Sikh. Tempat pemilihannya berbeda namun waktunya bersamaan.¹

Menurut pasal 41 ayat 2 konstitusi Pakistan menyatakan bahwa presiden haruslah seorang Muslim yang berumur 45 tahun ke atas, dipilih tiap lima tahun sekali oleh electoral college yang terdiri dari Senat, Dewan Nasional dan Dewan Provinsi. Seseorang dapat dipilih menjadi presiden untuk kedua kalinya bila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 konstitusi'73 yang telah diamandemen pada tahun 1985 menyatakan bahwa presiden adalah kepala negara sementara kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri.

Secara umum presiden melakukan tugasnya atas nasehat perdana menteri (pasal 48 ayat 1) namun presiden juga memiliki wewenang penting. Salah satunya yang sangat penting yaitu membubarkan DPR (pasal 48 ayat 5) jika dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik atau melanggar undang-undang.²

Perdana Menteri dipilih oleh presiden dari anggota Dewan Nasional. Dalam bertugas Perdana Menteri dibantu oleh kabinet federal, dewan menteri yang dipilih oleh Presiden atas masukan dari Perdana Menteri. Kabinet federal terdiri dari para menteri dan penasihat. Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa perdana menteri harus menginformasikan kepada presiden segala keputusan yang diambil oleh kabinet yang berkenaan dengan masalah-masalah administrasi urusan federal. Menteri-menteri federal bertugas membantu perdana menteri dan mereka berhak untuk memberikan pendapat kepada presiden (pasal 91 ayat 1). Sejak awal tahun 1994, ada 33 jabatan kementerian, namun semenjak kudeta 1999, Jenderal Musharraf melakukan pengurangan dengan menggabungkan beberapa departemen di bawah tanggung jawab satu menteri.

Pakistan menganut sistem multi partai. Partai-partai politik di Pakistan kebanyakan dibentuk berdasarkan etnis. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik politik yang panjang di negara itu. Di antara partai-partai politik yang ada di Pakistan adalah Pakistan People's Party, Pakistan Moslem League, Mohajir Qoumi Mahaz, Awami National Pakistan, Jamaat e-Islami, Jamiatul-Ulama-i-Islami dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan sistem peradilan di Pakistan, ada tiga badan peradilan di negara tersebut: Mahkamah Agung (*Supreme Court*), Pengadilan Tinggi tingkat provinsi, dan pengadilan-pengadilan lainnya yang mengurus perkara

¹ Library of Congress, Pakistan-A Country Study, *Constitution and Government Structure*, www.yahoo.com.

² *Ibid.*

perdata dan pidana.³ Ketua Mahkamah Agung (MA) ditunjuk oleh presiden sementara hakim-hakim MA lainnya juga ditunjuk oleh presiden setelah berkonsultasi dengan ketua MA. Ketua MA dan hakim-hakim MA bertugas hingga mereka berumur 65 tahun. Para hakim Pengadilan Tinggi provinsi juga ditunjuk oleh presiden atas masukan dari ketua MA dan gubernur dari provinsi masing-masing. Terdapat juga Mahkamah Shariat federal yang terdiri dari delapan hakim Muslim, termasuk ketuanya yang ditunjuk presiden. Tiga di antara para hakim tersebut adalah ulama yang menguasai hukum Islam. Mahkamah ini memutuskan apakah suatu hukum yang berlaku berlawanan dengan ajaran Islam atau tidak. Jika berlawanan maka presiden dan atau gubernur harus mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menyesuaikan hukum tersebut dengan ajaran Islam. Mahkamah ini juga menerima putusan banding untuk disidangkan kembali terutama bila putusan tersebut berhubungan erat dengan hukum hudud, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran seperti mabuk, pencurian dan perzinahan. Selain itu, terdapat pengadilan-pengadilan khusus di Pakistan yang menangani kasus-kasus secara spesifik seperti pengadilan narkoba, pengadilan niaga, pengadilan buruh, pengadilan lalu-lintas, pengadilan asuransi, pengadilan pajak dan pengadilan khusus pelanggaran perbankan serta pengadilan khusus teroris. Permohonan banding dari pengadilan-pengadilan khusus ini akan dilakukan di Pengadilan Tinggi kecuali pengadilan buruh dan pengadilan lalu lintas yang memiliki forum tersendiri. Sementara itu pengadilan asuransi dan pengadilan pajak bandingnya akan diselesaikan di Mahkamah Agung.

Dalam sistem yudisial Pakistan juga terdapat lembaga ombudsman yang bernama Wafaqi Mohtasib yang bertugas menjamin konstitusi Pakistan. Lembaga seperti ini banyak terdapat di sebagian besar negara-negara Islam untuk menjamin agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap warga negaranya. Orang-orang yang duduk di lembaga ini ditunjuk oleh presiden untuk masa jabatan empat tahun, tidak bisa diperpanjang dan diperbaharui. Tujuan Mohtasib adalah melembagakan suatu sistem agar dapat menyelenggarakan sistem administratif yang bertanggung jawab, melalui penyelidikan dan membetulkan atau memperbaiki setiap ketidakadilan yang terjadi pada seseorang karena kesalahan administrasi dari badan pemerintah atau pun pejabat pemerintah itu sendiri.

Mohtasib memiliki wewenang untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada siapa saja yang merasa rugi akibat misadministrasi tadi. Mohtasib juga menerima keluhan-keluhan masyarakat, termasuk persoalan yang berhubungan dengan luar negeri, ketahanan nasional dan militer. Pada intinya Wafaqi Mohtasib ini dibentuk sebagai jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya guna meningkatkan proses dan prosedur birokrasi agar menjadi

³ Library of Congress, Pakistan A Country Study, *Judiciary*, www.yahoo.com.

lebih mudah dan membantu menghindarkan penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang.⁴

Militer dan Keterlibatannya dalam Politik di Pakistan

Warisan politik Pakistan yang penting adalah pasukan militernya terutama peranannya yang sangat besar. Tugas militer dalam menjaga dan mempertahankan Republik Islam Pakistan semakin lama semakin kuat. Militer selalu menjadi pemimpin politik alternatif dalam keadaan krisis. Sebagaimana di negara berkembang lainnya, mereka adalah pasukan pembaharu dalam masyarakat dan menjadi kunci terwujudnya integrasi nasional sebagai pertahanan bagi kepentingan nasional menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Sesungguhnya ada tiga aktor utama (troika) dalam perpolitikan Pakistan, yaitu presiden, perdana menteri dan militer. Namun sentrum dari ketiga kekuasaan itu tetap dikendalikan militer. Sehingga siapapun yang ingin menjadi pemimpin Pakistan harus mendapat restu militer. Atau malah militer sendiri yang terlibat sebagai pemimpin politik tertinggi di negara itu.

Pada pasal 243 konstitusi tahun 1973 dinyatakan bahwa pemerintah federal menguasai Angkatan Bersenjata, dan memberikan kekuasaan pada presiden untuk mempertahankan dan meningkatkan pasukan baik aktif maupun cadangan, menaikkan pangkat, dan menunjuk kepala staf masing-masing angkatan (darat, laut dan udara).⁵ Berdasarkan pasal 242, presiden adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Tetapi karena presiden selalu bertindak menurut arahan dari perdana menteri, maka pada tahun 1985 diumumkanlah amandemen VIII oleh Zia ul-Haq yang secara fundamental merubah konstitusi tahun 1973, terutama dijelaskan dalam pasal 90 yang menyatakan bahwa kekuasaan nasional secara eksekutif berada di tangan presiden. Pasal 245 menetapkan fungsi Angkatan Bersenjata Pakistan yaitu mempertahankan negara dari serangan luar atau ancaman perang, menjelaskan posisi Angkatan Bersenjata dalam hukum yaitu sebagai subyek hukum, dan Angkatan Bersenjata merasa terpanggil untuk memberikan dukungan terhadap kekuasaan sipil dalam masalah-masalah politik dalam negeri. Pasal ini bertujuan untuk menjaga agar militer tidak bersikap independen terhadap masalah-masalah domestik di bawah pemerintahan sipil.

Pada pasal 244 ditetapkan bahwa sumpah yang diikrarkan oleh Angkatan Bersenjata (sumpah prajurit) termasuk sumpah untuk tidak melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan politik dalam bentuk apapun. Namun pernyataan ini tidak membatasi anggota militer untuk menggunakan hak pilihnya. Sementara itu Pasal 39 memerintahkan negara untuk membolehkan seluruh rakyat

⁴ *Ibid.*

⁵ Library of Congress, Pakistan A Country Study, *The Armed Service : Constitutional Basis and Mission*, www.yahoo.com.

Pakistan bergabung dalam Angkatan Bersenjata.⁶ Sebagai tambahan, konstitusi Pakistan menetapkan bahwa tugas militer Pakistan adalah mempertahankan negara dan melanjutkan misi tradisional mereka yaitu “*aid to the civil power*”, membantu kekuasaan sipil. Secara implisit, militer memiliki hak menunjuk diri sendiri sebagai penjaga tata keamanan dan politik domestik. Disebut juga *guardian of the family silver*. Menurut Mushahid Hussain, seorang jurnalis Pakistan, konsep misi seperti ini yang menyebabkan militer berkecimpung di bidang politik, ekonomi dan hankam.

Awal Keterlibatan Militer dalam Politik di Pakistan

Sebagai suatu negara baru yang masih mencari identitas diri, beberapa tahun setelah kemerdekaannya, Pakistan masih dihadapkan pada perbedaan pandangan di kalangan kaum Muslim Pakistan tentang bagaimana seharusnya negara Islam itu. Perbedaan pandangan itu terutama sekali terjadi antara kubu modernis dan kubu tradisional fundamentalis. Keadaan seperti ini terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Jenderal Iskandar Mirza yang terpilih menjadi presiden di bawah konstitusi 1956 (konstitusi pertama Pakistan). Presiden Mirza lantas menanggukkan konstitusi 1956, membubarkan partai politik, menghapuskan badan-badan legislatif dan memberlakukan UU darurat.

Keputusannya yang dipandang kurang bijaksana itu mendorong Ayub Khan mengambil alih kekuasaan, di mana ia tetap mempertahankan keadaan darurat hingga Juli 1962. Walaupun demikian, pemerintah militer Ayub Khan tetap mewarisi kontroversi yang tidak berkesudahan antara kubu-kubu kaum Muslim di Pakistan. Sementara itu kecenderungan modernistis Ayub Khan membuat pertikaian antara kubu modernis dengan kubu tradisional-fundamentalis makin bertambah parah. Pemerintahannya hanya bertahan hingga 1969, ia dipaksa mengundurkan diri menyusul sejumlah kerusuhan yang terjadi di Pakistan (Taufik Adnan, 1989: 71). Setelah Ayub Khan, pemerintahan dipegang oleh Agha Mohammad Yahya Khan yang juga memberlakukan UU Darurat. Bulan Desember 1970, pemimpin Pakistan People’s Party (PPP), Zulfikar Ali Bhutto, memenangkan pemilu presiden. Tetapi tujuh tahun kemudian (Juli 1977), Ali Bhutto dikudeta militer dengan tuduhan pembunuhan politik di tahun 1974. Ali Bhutto dihukum gantung pada April 1979 dan tampillah Jenderal Zia ul-Haq. Nasib Zia ul-Haq tak kalah buruk dibanding Bhutto. Ia tewas ketika pesawat yang ditumpanginya meledak pada Agustus 1988. Setelah itu, tampillah putri Ali Bhutto, Benazir Bhutto, yang memenangkan pemilu tahun 1988. Ia menjadi wanita pertama yang memimpin sebuah negara Islam. Mulai 2 Desember 1988 ia dilantik sebagai perdana menteri, sementara jabatan presiden dipegang Ghulam Ishaq Khan.

⁶ *Ibid.*

Karir politik Benazir Bhutto tak jauh berbeda dari ayahnya. Pada 6 Agustus 1990 ia dipecat oleh Presiden Ghulam Ishaq Khan atas tuduhan korupsi. Tindakan Ghulam Ishaq Khan ini mendapat dukungan Angkatan Bersenjata. Kemudian Ghulam Ishaq Khan mengangkat Ghulam Mustafa Jatoi sebagai perdana menteri sementara. Pada pemilu yang diadakan pada 24 dan 27 Oktober 1990, kursi perdana menteri berhasil direbut Mian Nawaz Sharif yang berasal dari Aliansi Demokratik Islam. Ketika mulai berkuasa, Nawaz Sharif mengatakan bahwa tugas dari pemerintah adalah merumuskan kebijakan, bukan mengelola industri, perdagangan, dan hotel, maka sejak pemerintahannya, diberlakukan 3D, yaitu program pembaruan ekonomi-*disinvestment, deregulation, and denationalization* (Kompas, 21 November 1999).

Bulan April 1993, Presiden Ghulam Ishaq Khan memecat Perdana Menteri Nawaz Sharif dan membubarkan Majelis Nasional. Presiden menuduh Nawaz Sharif terlibat dalam korupsi dan melakukan teror terhadap lawan politik pemerintah. Balkh Sher Mazari diangkat sebagai perdana menteri sementara. Sebulan kemudian Mahkamah Agung memulihkan Nawaz Sharif sebagai Perdana Menteri Pakistan. Tetapi pada 19 Juli 1993 baik Nawaz Sharif maupun Ghulam Ishaq Khan mengundurkan diri guna mengakhiri permusuhan politik di negeri itu. Mundurnya Nawaz Sharif membuka peluang bagi Benazir Bhutto untuk tampil kembali. Maka pada 19 Oktober 1993 ia terpilih kembali menjadi perdana menteri dalam pemungutan suara di Majelis Nasional.

Sementara itu pada 14 November 1993, Farooq Ahmad Khan Leghari diambil sumpahnya sebagai Presiden Pakistan yang kedelapan. Tetapi, untuk kedua kalinya, tahun 1996, Benazir dipaksa mundur dan dalam pemilu tahun berikutnya (1997) kursi perdana menteri direbut pimpinan Liga Muslim Pakistan (PML) pimpinan Nawaz Sharif. Tetapi pada 12 Oktober 1999, Nawaz Sharif disingkirkan lewat kudeta militer oleh Jenderal Pervez Musharraf yang kemudian membawa kembali Pakistan ke pemerintahan militer. Nawaz Sharif sendiri ditahan, diadili dengan tuduhan korupsi, berkomplot untuk melakukan pembunuhan politik terhadap Musharraf.

Keterlibatan militer dalam bidang politik di Dunia Ketiga, sebagaimana yang dijelaskan Harold Crouch, berhubungan erat dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Ketidakmampuan pemerintahan sipil menciptakan kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang stabil telah memaksa pihak militer Pakistan mengambil alih kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan. Rezim militer paling populer yang pernah berkuasa di Pakistan adalah masa pemerintahan Zia ul-Haq. Walaupun kepemimpinannya dikecam banyak pihak namun banyak sekali hal positif yang dapat diraih Pakistan pada saat ia berkuasa, di antaranya yaitu:

Pertama, banyak pihak yang menilai Zia cukup berhasil memajukan perekonomian Pakistan yang berpengaruh pada kestabilan politik. Apalagi *Islamic Order* yang digalakkannya cukup memenuhi harapan rakyat Pakistan yang mayoritas Muslim. Maka pada referendum 1984 rakyat Pakistan tanpa ragu-ragu memberikan mandat baru bagi Zia untuk memimpin Pakistan hingga tahun 1990.

Kedua, di pentas politik Zia memang identik dengan sikap keras, represif, cerdas dan tak kenal kompromi. Bahkan pihak oposisi menyebutnya sebagai seorang tiran. Namun di pihak lain banyak yang mengakui bahwa Zia adalah sosok dengan kepribadian yang ramah, jujur, menarik dan tidak korup. Bahkan dialah satu-satunya pemimpin Pakistan yang tidak mau menempati istana kepresidenan dan lebih suka tinggal di rumahnya yang sederhana di Rawalpindi. Zia juga melarang fotonya di pasang di kantor-kantor dan tempat-tempat umum karena tidak suka akan pengkultusan individu. Zia pun merupakan pemimpin Pakistan pertama yang sejak 25 Juni 1988, menentukan nilai mahar bagi wanita miskin, membuka lapangan kerja bagi para janda dan kaum cacat. Dengan demikian banyak yang berpendapat tidaklah terlalu tepat menyebut Zia ul-Haq sebagai figur yang otoriter dan represif. Kalaupun benar, kekerasan itu lebih ditujukan kepada kelompok oposisi dan bukan pada masyarakat. Bahkan pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya Zia telah memperlihatkan itikad demokratisasi dengan mencabut UU darurat dan membentuk pemerintahan sipil. Fakta ini jelas menyebabkan tidak efektifnya upaya Benazir Bhutto yang berusaha menumbuhkan kebencian rakyat terhadap Zia. Apalagi mengingat bahwa mendiang Zulfikar Ali Bhutto (ayah Benazir) sebenarnya juga tak bersih dari sikap otoriter dan represif.

Ketiga, selama kepemimpinan Zia, prestise Pakistan ternyata meningkat dikarenakan keaktifan Pakistan membantu Mujahidin Afghanistan dan keaktifannya dalam forum-forum komunikasi Islam. Langkah ini bukan saja menyebabkan Pakistan memperoleh bantuan senjata dan ekonomi tetapi juga menempatkan Zia ul-Haq sebagai pemimpin yang sangat menonjol di kawasan Asia Selatan, serta sangat penting perannya bagi konstelasi strategis geopolitik kawasan tersebut. Zia dikenal pandai berdiplomasi, mempunyai daya ingat tinggi dan berani. Sebagai bukti, Zia dengan sangat berani pernah memproklamirkan Pakistan sebagai negara Islam pertama yang mampu membuat senjata nuklir.

Keempat, walaupun Zia telah membentuk pemerintahan sipil tetapi ia tetap memegang jabatan presiden, Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Staf Angkatan Darat. Zia masih dapat menerapkan UU darurat jika keamanan negara terancam. Zia juga seorang pemimpin yang senantiasa memperhatikan kesejahteraan para perwiranya, dan mengizinkan banyak perwira tingginya

memiliki rumah mewah. Zia mengalokasikan dana hampir 50% dari anggaran belanja negara untuk keperluan Angkatan Bersenjata. Maka dapat dimengerti bila militer menjadi sangat kompak dan patuh pada Zia ul-Haq (Dhuroruddin Mashad, 1999).

Kudeta Militer Tahun 1999

Berbagai skandal korupsi, kehancuran ekonomi, pergolakan politik dan kekacauan sosial selama era pemerintahan sipil dijadikan militer Pakistan sebagai dalih melakukan kudeta pada Oktober 1999. Kinerja politisi sipil Pakistan memang termasuk mengecewakan. Ketika era militerisme yang panjang berakhir tahun 1988, mereka bersama-sama larut dalam euforia politik. Masyarakat Pakistan merasa lega atas tamatnya riwayat 11 tahun kekuasaan Jenderal Mohammad Zia ul-Haq. Harapan kehidupan demokrasi dan perlindungan hak azazi pun mulai berkembang. Akan tetapi krisis ekonomi dan politik tidak membaik, malah bertambah rumit dan berlarut-larut. Para politisi saling berselisih, partai-partai terus bertikai. Elit politik Pakistan sangat sulit melakukan kompromi politik sehingga sulit ditemukan jalan keluar yang demokratis karena elit politik tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai reformasi, demokratisasi, pemerintahan yang baik dan bersih.

Skandal korupsi, persoalan polarisasi politik dan penyalahgunaan wewenang telah berlangsung secara terang-terangan. Akan tetapi di atas segalanya, pengelolaan ekonomi yang salah telah membuat Pakistan sulit mengejar kemajuan. Gejala korupsi mulai tampak merajalela setelah rezim militer Zia mencabut UU darurat bulan Desember 1985. Kecenderungan melakukan korupsi itu tidak berhenti begitu rezim Zia berakhir, tetapi semakin meluas hingga saat ini. Jenderal Zia tewas bulan Agustus 1988 dalam kecelakaan pesawat yang hingga saat ini penyebabnya belum diketahui. Setelah empat belas tahun sejak pencabutan UU darurat tahun 1985, kekuatan politisi sipil masih tetap gamang. Sebaliknya militer mampu melakukan konsolidasi kekuatan selama lebih dari satu dasawarsa, dan mulai tampil kembali ke panggung kekuasaan. Sebaliknya kehidupan demokrasi memasuki lorong yang sulit dan gelap. Meski militerisme termasuk sistem kekuasaan yang paling tidak populer dan dikecam di seluruh dunia, tetapi realitas itulah yang dihadapi Pakistan.

Konflik Antara Sipil Dengan Militer

Adapun konflik antara sipil dan militer ini lebih dimaksudkan pada konflik antara mantan PM Nawaz Sharif dengan pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Pervez Musharraf berkaitan dengan persoalan yang dijelaskan di bawah ini:

Dilema Kashmir

Wilayah Kashmir yang luasnya kurang lebih 222.798 km² berbatasan dengan Pakistan, Afghanistan dan Cina. Problem Kashmir bermula ketika kolonial Inggris—yang telah menduduki Kashmir sejak 1846—hendak meninggalkan anak benua India. Berdasar usulan Ali Jinnah, pimpinan Liga Muslim, Inggris menyetujui diterapkannya prinsip pemisahan wilayah Muslim-Hindu menjadi dua negara, Pakistan-India. Prinsip ini menegaskan sekitar 500 wilayah (negara bagian) di India yang dikuasai pangeran berhak menentukan pilihannya—berdasar kehendak rakyat—untuk berafiliasi ke Pakistan atau India. Wilayah yang mayoritas Muslim tentu saja bergabung ke Pakistan, sementara yang Hindu tetap di India (Dhuroruddin Mashad, 1999: 104).

Sejak awal rakyat Kashmir hendak ikut ke dalam Pakistan. Karena secara historis, emosional dan kultural memang lebih dekat ke Pakistan yang sama agama. Tetapi penguasanya, Maharaja Hari Singh bersikap ragu-ragu sehingga menimbulkan kemarahan rakyat Kashmir. Pada Agustus-September 1947 muncul gelombang protes rakyat Kashmir yang dibantu Pakistan. Hari Singh yang merasa takut meminta bantuan New Delhi. PM Jawaharlal Nehru bersedia membantu dengan syarat ada jaminan wilayah Kashmir bergabung ke India.

Setelah penguasa Kashmir sepakat terhadap syarat Nehru dan menandatangani surat penyerahan wilayah Kashmir dengan India (27 Oktober 1947) maka terjadilah perseteruan awal Pakistan-India. Masing-masing menempatkan tentaranya di wilayah Kashmir sehingga meletuslah perang Kashmir pertama. Pakistan berhasil dipukul mundur hingga tinggal 1/3 wilayah yang dapat dipertahankannya yang sampai sekarang disebut Azad Kashmir. Sedangkan 2/3 lainnya, Jammu Kashmir, berhasil diduduki India. Persolan Kashmir ini sudah sering dibawa ke PBB. Untuk pertama kalinya oleh Nehru. Namun anehnya, setelah komisi PBB (UNCIP) yang menjadi penengah menetapkan agar Kashmir ditentukan oleh rakyatnya sendiri, India malah mengabaikannya. India khawatir bila dilakukan plebisit sebagaimana di Junagadh maka Kashmir akan bergabung ke Pakistan. Alasan ekonomi dan keamanan menjadi penyebab India bersikukuh mempertahankan Kashmir. Ada tiga sungai yang mengalir di Kashmir yaitu Indus, Chenab dan Jhelum. India tak mau melepaskan karena sungai-sungai tersebut merupakan sumber air yang penting bagi India. Wilayah Jammu Kashmir memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi India karena terletak di dataran tinggi yang dari sana kedua negara, India dan Pakistan, bisa dipantau dengan mudah. Posisi demikian jelas sangat penting bagi sistem pertahanan dan keamanan, serta sangat riskan bila sampai jatuh ke tangan Pakistan. Alhasil, plebisit pun tak pernah terealisasi sehingga menyebabkan krisis Kashmir tidak berkesudahan. Bahkan pada tahun 1964 muncul organisasi militan Front Pembebasan Jammu

Kashmir (*Jammu Kashmir Liberation Front/JKLF*) (Dhurorddin Mashad, 1999: 105-106). PBB yang tidak menemukan keberhasilan dalam penyelesaian konflik Kashmir antara India dan Pakistan akhirnya memutuskan bahwa persoalan itu adalah urusan bilateral negara, sehingga PBB tidak lagi turut campur dalam masalah itu.

Pemaksaan Penarikan Mundur Pasukan Militer Pakistan dari Jammu Kashmir
Sejak 26 Mei 1999, India melancarkan serangan pada para gerilyawan Kashmir yang menduduki wilayah kekuasaan India di perbatasan. Persetujuan mengenai garis batas (*Line of Control/LoC*) antara Kashmir yang dikuasai India dengan Kashmir yang dikuasai Pakistan muncul setelah pertemuan antara PM Zulfikar Ali Bhutto dengan PM Indira Gandhi tahun 1972 di Shimla.

Pihak India meyakini bahwa yang menduduki wilayah strategisnya di Kargil, Kashmir yang mereka sebut sebagai penyusup, bukan saja gerilyawan kemerdekaan Kashmir tetapi juga terdapat para tentara reguler Pakistan dan prajurit asing bayaran. Maka sejak 26 Mei itu gempuran demi gempuran baik darat maupun udara dilakukan India untuk mengusir para penyusup. Gempuran itu sendiri mendapat balasan dari para gerilyawan yang mendapat dukungan tentara Pakistan.

Sebagai suatu terobosan untuk menghentikan konflik India-Pakistan mengenai Kashmir, maka pada tanggal 4 Juli 1999, PM Nawaz Sharif mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Bill Clinton di Washington. Hasil dari pertemuan itu adalah Clinton dan Sharif mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan itu mereka mengatakan sepakat mengambil langkah konkret untuk memulihkan Garis Pengawasan antara Kashmir yang dikuasai India dan yang dikuasai Pakistan.

Hasil pertemuan Sharif dengan Clinton diterima India dengan sikap sangat hati-hati. Pihak India tetap melanjutkan aksi militernya dengan kekuatan penuh sampai penarikan mundur terlaksana tuntas. Mereka belum terlalu yakin bahwa Sharif mampu membujuk militer Pakistan dan kelompok-kelompok militan untuk mundur. Niat PM Sharif yang berusaha mencari penyelesaian krisis Kashmir lewat jalan diplomasi membuat pihak militer kecewa sehingga keputusannya itu menjadi awal ketegangan hubungan antara Sharif dengan militer. Tampaknya Sharif ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa ia memang serius dalam mengatasi konflik Kashmir dengan India.

Pemecatan Musharraf

Karir militer Musharraf dimulai pada tahun 1964, sebelum akhirnya memegang berbagai unit komando. Musharraf pernah menjadi komandan divisi infanteri

dan korps pasukan khusus (*Special Services Group*) yang dipegangnya selama tujuh tahun. Namanya dikenal luas ketika ia diangkat oleh PM Nawaz Sharif menjadi Panglima Angkatan Darat Pakistan pada bulan Oktober 1998 menggantikan Jenderal Jehangir Karamat yang mengundurkan diri setelah melemparkan kritik tajam kepada Sharif. Pada 5 Oktober bertempat di markas Angkatan Laut di Lahore, Karamat menyerukan pembentukan dewan keamanan nasional yang melibatkan pakar terpercaya, politisi, dan pejabat militer. Ia juga menyerukan agar militer diberi peran lebih luas. Kritik lainnya adalah politisi sangat sibuk menumpahkan dendam kesumat terhadap lawan politiknya, padahal situasi Pakistan sedang dilanda krisis. Banyak yang menilai pernyataan Karamat itu lebih ditujukan pada Sharif yang memang bermasalah. Menurut penyelidikan, rekeningnya di luar negeri berjumlah hingga US\$ 70 juta dan beberapa flat di London.

Kemudian Sharif mengangkat Musharraf sebagai Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata dan jabatan itu menurut rencana akan dipegang hingga tahun 2001. Tetapi ternyata Sharif bermain di dua tempat. Ia mengangkat Musharraf sebagai Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata sekaligus mendekati Kepala Dinas Intelijen Jenderal Zia Uddin. Kemarahan Musharraf dan jajaran militer mencapai puncaknya ketika pada 12 Oktober 1999, Sharif memberhentikan Musharraf dari semua jabatannya pada saat Musharraf berada di Kolombo, Sri Lanka. Bahkan kepulangan Musharraf dengan pesawat sipil yang ditumpanginya dilarang mendarat sementara bahan bakar pesawat itu hampir habis. Hal itu tentu membahayakan keselamatan sekitar 200 penumpang walaupun akhirnya pesawat itu mendarat juga di bandara Jinnah di Karachi setelah militer menguasai bandara itu. Musharraf yang merasa tidak puas terhadap keputusan Sharif dan menganggap Sharif berusaha melakukan usaha pembunuhan terhadap dirinya, bersama-sama dengan tentara yang loyal terhadapnya melakukan kudeta terhadap pemerintahan Nawaz Sharif pada 12 Oktober 1999.

KESIMPULAN

Peran militer masih sangat besar bahkan dapat dikatakan militer sangat dominan dalam politik di Pakistan. Ini dikarenakan militer Pakistan, sebagaimana militer-militer di kebanyakan negara berkembang, dianggap sebagai satu-satunya rezim yang sesuai dengan tujuan pembangunan terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II karena memiliki tiga kelebihan yaitu nilai-nilai yang ada dalam institusi itu lebih berorientasi pembangunan (*development-oriented*), rezim militer mampu membuat keputusan-keputusan yang tegas, luas dan kadang tak kenal kompromi, di samping itu militer juga memiliki aset-aset paksaan dan aparat yang terorganisir yang bila dibutuhkan mampu melaksanakan keputusan-keputusan dan menyelenggarakan stabilitas politik. Selain itu militer lebih nasionalistik, lebih berdisiplin dan berdedikasi.

Dalam sebuah wawancara tahun 1998, Jenderal Pervez Musharraf pernah mengatakan bahwa tentara Pakistan tidak lagi terlibat secara langsung dalam politik—walaupun militer memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan mereka di panggung politik. Musharraf menegaskan bahwa mereka hanya terlibat secara konseptual. Tetapi ketika kekecewaan terhadap pemerintahan sipil meledak maka tentara kembali campur tangan. Kebangkrutan politik, demoralisasi sistem demokrasi dan krisis ekonomi merupakan penyulut keterlibatan militer dalam politik. Jenderal Zia ul-Haq dalam pidatonya setelah menjatuhkan Ali Bhutto mengatakan: "Manakala para pemimpin politik gagal menyelamatkan negara dari krisis, adalah suatu dosa yang tidak dapat dimaafkan bila angkatan bersenjata diam saja seperti penonton."

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan. 1989. *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Habib, A. Hasnan. 1997. *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: CSIS.
- Habib, A. Hasnan. 1988. *Militer, Politik dan Dwifungsi ABRI: Teknologi dan Strategi Militer*. Jakarta: CSIS.
- Library of Congress. *Pakistan: A Country Study*.
- Mashad, Dhuroruddin. 1996. *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*. Jakarta: CIDES.
- Mashad, Dhuroruddin. 1999. *Agama Dalam Kemelut Politik: Dilema Sekularisme di India*. Jakarta: CIDES.
- Palmer, Monte. *The Military and Political Development*, Illinois: F.E. Peacock Publishers.
- Singh, Bilveer. 1995. *Dwifungsi ABRI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Uchikawa, Shuji. 2000. *Pakistan's Crisis: Political and Economic Analysis*. Institute of Developing Economies.